

# EFEKTIVITAS SISTEM PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SECARA ONLINE (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Salabiah<sup>1</sup>, Arpandi<sup>2</sup>, Erwin Maulana<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [salabiah7678@gmail.com](mailto:salabiah7678@gmail.com)

## ABSTRAK

Penerapan Online Single Submission (OSS) bertujuan mempermudah perizinan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, implementasi OSS di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur masih menghadapi kendala teknis sistem serta rendahnya pemahaman UMKM dalam menggunakan platform OSS akibat terbatasnya sosialisasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses perizinan belum berjalan optimal dan berpotensi menurunkan partisipasi UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 14 informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan uji kredibilitas menggunakan triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya pendampingan menyebabkan pelaku UMKM masih bergantung pada aparatur pemerintah. Temuan ini mengindikasikan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan agar penerapan OSS lebih efektif dan inklusif.

**Kata Kunci:** Online Single Submission, UMKM, Perizinan Usaha

## ABSTRACT

*The implementation of the Online Single Submission (OSS) system is intended to simplify business licensing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, its application in Dusun Tengah District, East Barito Regency, continues to encounter technical disruptions and low system accessibility. These challenges are compounded by limited understanding and digital literacy among MSME actors, largely due to uneven socialization, resulting in a time-consuming and suboptimal licensing process. This study employs a descriptive qualitative approach using interviews, observation, and documentation, with 14 informants selected through purposive sampling. Data were analyzed through data condensation, presentation, and conclusion drawing, supported by triangulation and member checking to ensure credibility. The findings reveal that OSS implementation remains ineffective, as many MSME actors lack knowledge of its functions and procedures and therefore depend on government assistance. Inhibiting factors include insufficient socialization, low user comprehension, and access difficulties, while supporting factors involve clear regulatory frameworks and access to business financing. Strengthening outreach, infrastructure, and continuous assistance is essential to improve OSS effectiveness and inclusivity.*

**Keywords:** Online Single Submission, MSMEs, Business Licensing

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui penguatan perekonomian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayahnya. Otonomi daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi

daerah yang berkelanjutan. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan angka kemiskinan. Namun demikian, besarnya peran UMKM belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan sistem yang optimal, khususnya dalam aspek legalitas usaha, literasi digital, dan akses terhadap layanan pemerintah.

Legalitas usaha merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan dan daya saing UMKM. Kepemilikan legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), memberikan kepastian hukum, membuka akses terhadap pembiayaan, memperluas peluang kemitraan, serta meningkatkan kepercayaan pasar. Dalam konteks perkembangan globalisasi dan digitalisasi, legalitas usaha juga menjadi prasyarat utama agar UMKM dapat terintegrasi dalam sistem ekonomi formal. Menyadari pentingnya hal tersebut, pemerintah melakukan reformasi pelayanan publik melalui transformasi digital, salah satunya dengan menghadirkan sistem perizinan usaha berbasis elektronik melalui Online Single Submission (OSS). OSS dirancang sebagai sistem perizinan terpadu yang bertujuan menyederhanakan prosedur, mempercepat waktu pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan OSS di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun kesiapan infrastruktur pendukung.

Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi UMKM yang cukup besar dan tersebar di berbagai sektor usaha. Kecamatan Dusun Tengah merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi UMKM yang tinggi. Meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tidak seluruh pelaku usaha telah memiliki legalitas usaha melalui OSS. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan perizinan digital dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Berbagai kendala masih ditemui, seperti gangguan teknis sistem, keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, serta kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Situasi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan OSS sebagai sarana utama perizinan usaha di tingkat kecamatan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas OSS sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memberikan pendampingan, tingkat pemahaman pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan daerah. Penelitian Akbar (2023) menemukan bahwa pelayanan OSS dapat berjalan efektif apabila disertai dengan pendampingan intensif dan inovasi pelayanan berbasis e-government. Sementara itu, penelitian Astuti (2023) menunjukkan bahwa program UMKM cenderung kurang efektif ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman pelaku usaha, serta lemahnya pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan OSS di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur menjadi fenomena

yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menggali pengalaman dan persepsi pelaku UMKM serta aparatur pelayanan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha di tingkat daerah.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pelayanan perizinan OSS, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung legalitas usaha UMKM di tingkat kecamatan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barito Timur, khususnya di Kecamatan Dusun Tengah, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi dan telah menerapkan OSS sebagai inovasi pelayanan perizinan usaha. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam realitas sosial, pengalaman, serta persepsi pelaku UMKM dan aparatur pelayanan terkait implementasi OSS.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses pelayanan perizinan OSS. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan OSS. Informan terdiri atas aparatur DPMPTSP, perangkat dinas terkait, serta pelaku UMKM di Kecamatan Dusun Tengah dengan jumlah keseluruhan 14 orang. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, data jumlah UMKM, data pengguna OSS, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan OSS, wawancara untuk menggali informasi mendalam dari informan, serta dokumentasi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan indikator efektivitas menurut Edy Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, sehingga dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat efektivitas implementasi OSS. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, serta member check. Melalui langkah-

langkah tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang objektif serta akurat mengenai efektivitas sistem perizinan usaha berbasis OSS pada DPMPTSP Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas sistem perizinan usaha mikro kecil dan menengah secara online (OSS) pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu**

#### **1. Pemahaman program**

Pemahaman program mencerminkan tingkat pengetahuan dan pengertian penerima terhadap tujuan serta alur pelaksanaan program. Pemahaman yang memadai memungkinkan peserta menjalankan prosedur secara tepat dan memanfaatkan program secara maksimal. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan dan berdampak pada rendahnya efektivitas program. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pendampingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program.

##### **a. Pemahaman terhadap sistem oss**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Barito Timur terhadap Sistem Online Single Submission (OSS) masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami fungsi, manfaat, serta prosedur penggunaan OSS, sehingga mengalami kesulitan teknis dan cenderung bergantung pada bantuan aparatur pemerintah. Sebaliknya, aparatur dari DPMPTSP dan Dinas Koperasi UMKM menunjukkan penguasaan yang baik terhadap OSS dalam menjalankan peran pendampingan dan sosialisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi OSS belum berjalan efektif karena rendahnya literasi perizinan dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses sistem secara mandiri. Temuan ini belum sejalan dengan teori Edy Sutrisno yang menekankan bahwa pemahaman program mencakup pengetahuan, pengertian, dan kemampuan pelaksana untuk menjalankan program secara mandiri, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif.

##### **b. Kemampuan Mengakses Sistem**

Berdasarkan wawancara dan observasi, kemampuan pelaku UMKM di Kabupaten Barito Timur dalam menggunakan OSS masih rendah. Banyak pelaku usaha belum dapat mengakses sistem secara mandiri, sehingga masih bergantung pada pendampingan dinas. Kendala ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat dan jaringan, serta sosialisasi yang belum merata. Meskipun pendampingan sudah dilakukan, implementasi OSS belum optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan intensif agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan OSS secara mandiri sesuai

prinsip teori Edy Sutrisno.

## 2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran menunjukkan sejauh mana tujuan program sesuai dengan kelompok penerima manfaat. Dalam OSS, hal ini tercermin dari kemampuan sistem dijangkau dan digunakan oleh pelaku UMKM yang membutuhkan legalitas usaha. Program dianggap tepat sasaran jika pelaku UMKM dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan OSS sehingga memperoleh kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pengakuan usaha. Jika masih ada kendala teknis, informasi, atau sumber daya sehingga OSS tidak dimanfaatkan, maka tujuan program belum sepenuhnya tercapai.

### a. Program Bantuan UMKM

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, program bantuan UMKM di Kabupaten Barito Timur cukup efektif bagi pelaku usaha yang memiliki NIB. Bantuan mencakup modal, pelatihan, pendampingan, fasilitas usaha, dan keringanan biaya operasional, dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mengelola bantuan, serta DPMPSTSP menangani aspek legalitas. UMKM dengan NIB lebih mudah mengakses bantuan, termasuk dari pihak swasta. Namun, pemanfaatan program belum merata karena masih banyak UMKM tanpa NIB dan keterbatasan informasi, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan agar OSS dapat dimanfaatkan optimal, sesuai teori ketepatan sasaran Edy Sutrisno.

### b. Ketepatan sasaran sistem OSS bagi pelaku UMKM

Berdasarkan wawancara dan observasi, OSS di Kabupaten Barito Timur dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh NIB, mengakses bantuan pemerintah, pelatihan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Namun, banyak UMKM belum memahami manfaat dan tata cara penggunaan OSS, menghadapi kendala teknis, serta keterbatasan jaringan, sehingga masih harus datang ke dinas untuk pengurusan izin. Kondisi ini menunjukkan OSS belum sepenuhnya tepat sasaran menurut teori Edy Sutrisno, karena manfaat program belum dirasakan optimal oleh kelompok sasaran.

## 3. Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan cepat, efisien, dan sesuai standar, sehingga setiap tahapan perizinan OSS dapat terlaksana tanpa hambatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Namun, masih ada UMKM yang menghadapi kendala teknis dan rendahnya literasi digital, sehingga proses perizinan belum sepenuhnya tepat waktu. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan agar seluruh pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS secara optimal dan memperoleh layanan yang cepat, akurat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### **a. Kecepatan Proses Pelayanan Izin Berusaha**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelayanan izin usaha melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Barito Timur umumnya efektif dan cukup cepat, terutama saat jaringan internet stabil dan data pemohon lengkap. Kemudahan akses OSS memungkinkan pelaku UMKM mengurus izin kapan saja, menghemat waktu, mengurangi antrean, dan meningkatkan efisiensi. Meski demikian, keterbatasan fasilitas, seperti hanya satu komputer dan potensi gangguan jaringan, kadang memperlambat proses, sehingga pendampingan petugas tetap diperlukan. Secara keseluruhan, pelayanan ini sejalan dengan teori Edy Sutrisno tentang tepat waktu, yang menekankan pentingnya efisiensi, kelancaran, dan kepuasan penerima layanan, sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat dan mendukung terciptanya proses administrasi yang lebih profesional serta transparan.

#### **b. Kelancaran sistem OSS**

Berdasarkan wawancara dan observasi, pelayanan izin usaha melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Barito Timur tergolong efektif, terutama karena OSS mempermudah dan mempercepat penerbitan NIB. Kecepatan layanan sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet dan ketersediaan fasilitas seperti komputer, sehingga gangguan teknis kadang menyebabkan antrean dan keterlambatan. Petugas aktif memberikan pendampingan untuk membantu pemohon memahami prosedur dan istilah teknis. Secara umum, pelayanan ini sejalan dengan teori Edy Sutrisno tentang tepat waktu, yang menekankan pentingnya efisiensi dan kepuasan penerima layanan, meskipun masih diperlukan perbaikan infrastruktur agar ketepatan waktu dapat diterapkan secara konsisten bagi semua UMKM.

### **4. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah tingkat keberhasilan suatu program, kegiatan, atau layanan dalam mencapai sasaran atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, pencapaian tujuan menunjukkan seberapa efektif suatu proses atau sistem dalam memenuhi tujuan yang diharapkan. Evaluasi pencapaian tujuan penting untuk menilai keberhasilan program dan menentukan langkah perbaikan jika target belum tercapai.

#### **a. Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki izin usaha**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Barito Timur tergolong efektif karena membantu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha melalui arahan langsung bagi pelaku usaha yang datang ke dinas. Kendala seperti keterbatasan fasilitas dan gangguan jaringan masih kadang memperlambat proses. Sesuai dengan teori Edy mengenai pencapaian tujuan, layanan OSS umumnya telah memenuhi sasaran yang diharapkan, yakni meningkatkan kepatuhan UMKM dan mendukung pengembangan usaha resmi, meskipun perbaikan fasilitas, sosialisasi, dan

pendampingan tetap diperlukan agar pencapaian tujuan lebih optimal.

#### **b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM di Kabupaten Barito Timur, mayoritas responden merasa puas dengan layanan perizinan melalui sistem OSS karena proses penerbitan NIB lebih cepat, persyaratan jelas, dan pendampingan petugas DPMPTSP membantu pelaku usaha yang kurang familiar dengan sistem digital. Meskipun sebagian kecil pelaku UMKM mengalami kesulitan teknis, pendampingan petugas menjaga kelancaran proses. Observasi menunjukkan pelayanan tertib, ruang rapi, dan OSS meningkatkan kemudahan, efisiensi, serta kepuasan masyarakat. Sesuai teori Edy, layanan ini efektif karena tepat sasaran, meningkatkan kepatuhan UMKM, dan memudahkan pengurusan izin, meski fasilitas, sosialisasi, dan literasi digital perlu ditingkatkan agar kepuasan lebih optimal.

#### **c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat**

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengurus izin usaha di Kabupaten Barito Timur meningkat, baik melalui OSS maupun layanan langsung di DPMPTSP. Kemudahan akses izin, kesadaran akan manfaat legalitas usaha, serta dorongan dari komunitas UMKM membuat lebih banyak pelaku usaha aktif membuat NIB. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas dan gangguan jaringan, antrean tertib dan peningkatan jumlah NIB menandakan efektivitas layanan. Sesuai teori Edy, peningkatan partisipasi ini mencerminkan pencapaian tujuan, mempercepat legalisasi usaha, dan mendorong kepatuhan pelaku UMKM.

### **5. Perubahan Nyata**

Perubahan nyata menunjukkan dampak konkret dari program OSS di DPMPTSP Kabupaten Barito Timur, berupa meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki NIB, kepuasan masyarakat yang lebih tinggi, dan partisipasi yang meningkat dalam mengurus izin, menandakan manfaat program dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini juga mencerminkan efektivitas implementasi OSS dalam mendorong legalitas usaha dan keteraturan administrasi UMKM.

#### **a. Mengikuti aturan pentingnya perizinan**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan OSS di DPMPTSP Kabupaten Barito Timur menunjukkan adanya perubahan nyata pada kepatuhan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB. Jumlah UMKM yang memiliki izin meningkat, proses pengurusan izin lebih tertib, dan pendampingan petugas mempermudah pelaku usaha yang kurang familiar dengan sistem digital. Meski terdapat kendala teknis, data grafik menunjukkan pertumbuhan NIB stabil sejak penerapan OSS, menandakan partisipasi dan kepatuhan UMKM meningkat. Hal ini sejalan dengan teori Edy, yang menyatakan

perubahan nyata terlihat dari dampak langsung pada perilaku penerima program, sehingga pendampingan lebih aktif diperlukan agar UMKM dapat memanfaatkan OSS secara mandiri.

#### **b. Meningkatkan kemudahan akses UMKM untuk memperoleh legalitas.**

Berdasarkan wawancara dan observasi, kemudahan akses UMKM dalam memperoleh legalitas melalui OSS di Kabupaten Barito Timur belum sepenuhnya efektif. Meskipun OSS mempermudah pembuatan NIB dan pendampingan petugas membantu pelaku usaha, banyak UMKM tetap datang langsung ke kantor dinas karena kesulitan menggunakan sistem digital atau kurangnya sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nyata sesuai teori Edy belum tercapai, karena belum ada perbaikan signifikan dalam perilaku UMKM untuk mengakses OSS secara mandiri dari rumah, sehingga pendampingan dan sosialisasi yang lebih luas masih diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk mendorong UMKM memanfaatkan OSS secara mandiri dan maksimal.

### **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Secara Online (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

#### **1. Faktor Penghambat**

##### **a. Kurangnya Sosialisasi**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, rendahnya sosialisasi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap OSS menjadi hambatan utama dalam pengurusan izin usaha. Banyak pelaku UMKM belum mengerti alur pendaftaran, pengisian data, dan pentingnya NIB, sehingga masih bergantung pada dinas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta peningkatan literasi digital agar UMKM dapat mengakses OSS secara mandiri. Peran aktif petugas dinas juga penting untuk mempercepat adaptasi pelaku UMKM dan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki NIB serta menjalankan usaha secara resmi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas OSS meningkat dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap perizinan usaha dapat semakin terjamin.

##### **b. Rendahnya Pemahaman Pelaku UMKM**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, rendahnya pemahaman pelaku UMKM menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem OSS di Kabupaten Barito Timur. Banyak pelaku usaha belum mengetahui bahwa OSS adalah platform resmi untuk pendaftaran izin dan penerbitan NIB, sehingga sebagian lebih memilih datang langsung ke kantor dinas. Kurangnya pengalaman digital membuat mereka kesulitan memahami alur pendaftaran, pengisian data, dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses izin menjadi lambat dan bergantung pada bantuan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan OSS belum

optimal dan masih membutuhkan perhatian intensif dari pihak terkait.

### c. Kesulitan Mengakses Sistem

Berdasarkan wawancara, kesulitan teknis dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama pelaku UMKM di Dusun Tengah dalam mengakses OSS. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas membuat perizinan dianggap rumit dan tidak mendesak, sehingga banyak UMKM belum memiliki izin resmi. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan agar pelaku UMKM lebih mudah dan termotivasi mengurus legalitas usahanya. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan program pemerintah secara lebih optimal..

## 2. Faktor Pendukung

### a. Adanya Kebijakan dan Peraturan Yang Jelas terkait OSS dan NIB

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, OSS dan OSS-RBA mempermudah perizinan usaha dengan menggantikan prosedur manual melalui mekanisme elektronik yang cepat, efisien, dan transparan. Sistem ini memungkinkan UMKM mengurus NIB dan izin usaha sesuai tingkat risiko, di mana usaha berisiko rendah hanya memerlukan NIB, sedangkan usaha menengah hingga tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan seperti sertifikasi standar. Dukungan regulasi, termasuk PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM, menegaskan OSS sebagai instrumen utama pemerintah untuk digitalisasi layanan perizinan, memberikan kepastian hukum, mendorong pendaftaran resmi, dan menghemat waktu serta biaya.

### b. Akses Pembiayaan dan Bantuan Modal

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, NIB menjadi kunci keberhasilan UMKM karena memberikan legalitas resmi yang membuka akses ke berbagai fasilitas pemerintah, seperti pendampingan, pelatihan, program kapasitas, serta bantuan modal. Banyak pelaku usaha menerima gerobak dan dana modal, yang meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan kelangsungan usaha. NIB meningkatkan kepercayaan, melindungi hukum, dan mendorong pertumbuhan UMKM secara legal dan efisien.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan sistem perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara online melalui OSS di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, menunjukkan efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Sistem OSS dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan proses perizinan, termasuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara legal dan memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, terutama

terkait rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap OSS, keterbatasan literasi digital, minimnya sosialisasi, serta akses perangkat dan jaringan internet yang tidak merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada pendampingan langsung dari petugas dinas untuk mengurus perizinan, sehingga OSS belum sepenuhnya dapat digunakan secara mandiri sebagaimana tujuan awal sistem ini.

Selain itu, beberapa program bantuan pemerintah, seperti pelatihan, modal usaha, dan fasilitas pendukung, belum sepenuhnya tepat sasaran karena banyak UMKM yang belum memiliki NIB atau belum memperoleh informasi yang memadai mengenai persyaratan dan prosedur OSS. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam bentuk sosialisasi yang luas, pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, serta perbaikan infrastruktur digital agar seluruh pelaku UMKM dapat mengakses sistem OSS secara mandiri. Kepemilikan NIB terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap berbagai bantuan pemerintah, seperti pelatihan, pendampingan, modal usaha, dan program pengembangan kapasitas. NIB tidak hanya memberikan legalitas usaha dan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, meningkatkan daya saing, kapasitas produksi, serta keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, efektivitas OSS sangat bergantung pada kombinasi antara faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat mencakup rendahnya literasi digital, keterbatasan sosialisasi, dan kesulitan akses, yang membuat proses perizinan lambat dan masih bergantung pada bantuan pihak lain. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, adanya NIB, serta ketersediaan program bantuan dan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kepatuhan pelaku UMKM. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa OSS memiliki potensi besar untuk menjadi sistem perizinan yang efisien, cepat, dan transparan, tetapi manfaat maksimalnya baru dapat tercapai jika pelaku UMKM mampu mengakses dan memanfaatkan sistem secara mandiri, didukung oleh pendampingan, sosialisasi, dan literasi digital yang memadai. Dengan perbaikan dan penguatan aspek-aspek tersebut, OSS dapat berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara legal, efisien, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M.Q.A.R., 2023. *Efektivitas Program Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission) Pada Pelaku Usaha Pemula Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang*. Makasar: Muhammadiyah.
- Anonim, 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Astuti, Y., 2023. *Efektivitas Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas*



*Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.*  
Skripsi, STIA Amuntai.

Peraturan Pemerintah, 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90.

Putra, Y.K., 2018. *Analisis Sistem OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), pp.101–111.